

## Pemkab Kucurkan Hibah Pilkada untuk Polres dan Kodim Rp12 M untuk Pengamanan



*Sumber gambar :*

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/238/2024/03/05/C9FC7233-128F-45E8-A966-603C25A6EC18-3051340100.jpeg>

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) mengucurkan hibah belasan miliar kepada TNI dan Polri untuk pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada November mendatang.

**TENGGARONG** – Pemberian hibah ditandai dengan penandatanganan Naskah Penyerahan Hibah Daerah (NPHD) bersama Polres Kukar, Kodim 0906 Kutai Kartanegara, Polres Bontang, dan Kodim 0908 Bontang, Senin (4/3).

Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan, hibah ini adalah komitmen pemerintah daerah untuk memastikan kesuksesan Pilkada nanti. Dengan kondisi geografis Kukar yang luas, membuat Kecamatan Marangkayu dan Muara Badak masuk teritorial Polres dan Kodim 0908 Bontang.

“Alokasi anggaran pengamanan ini telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan masing-masing pihak keamanan. Ini komitmen kami di pemerintah daerah agar Pilkada harus berjalan lancar dan sukses,” tegas Edi.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar Rinda Desianti mengatakan anggaran hibah pengamanan Rp12 miliar lebih. Dengan rincian Kodim 0906 Kukar Rp2.073.953.000, Polres Kukar Rp8.156.377.000, Kodim 0908 Bontang Rp624.305.000, dan Polres Bontang Rp1.289.990.000. Rinda mengatakan

pencairan akan dilakukan setelah penyegaran struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang baru.

“NPHD bersama KPU Kukar sudah kita lakukan Oktober tahun lalu. Persentase 40 persen sudah kita cairkan, tinggal nanti yang 60 persennya setelah KPU menyelesaikan tugasnya,” jelas Rinda.

Rinda mengatakan pencairan NPHD ini akan diserahkan sekaligus anggarannya, namun masih perlu melalui proses administrasi. Ia juga memastikan anggaran telah tersedia dan maksimum 14 hari sudah masuk ke rekening instansi masing-masing. Tinggal pihak pengamananan masing-masing menjalankan tahapannya. Hibah ini juga diharapkan dapat menjadi indikator demokrasi terhadap tingkat partisipasi.

“Pak Bupati juga mengajak semua elemen masyarakat, termasuk aparat keamanan, KPU, dan Bawaslu yang harus mengimbau dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi Pilkada nanti,” tuturnya. **(qi/far/k16)**

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost, Pemkab Kucurkan Hibah Pilkada untuk Polres dan Kodim Rp12 M untuk Pengamananan, 05/03/24
2. Tribun Kaltim, Pengamananan Pilkada Pemkab Kukar Hibahkan Rp12 Miliar, 13/03/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Permendagri 54/2019), hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 Permendagri 54/2019 bahwa naskah perjanjian hibah daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
3. Dalam Pasal 3 ayat (2) Permendagri 54/2019 diatur bahwa tahapan pengelolaan dana kegiatan pemilihan meliputi:
  - a. penganggaran;
  - b. pelaksanaan dan penatausahaan;
  - c. pelaporan; dan
  - d. pertanggungjawaban.